



► PENATAAN PERMUKIMAN

## 20 Fasilitator Mulai Verifikasi RTLH

SLEMAN—Sebanyak 20 tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang telah dikontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman saat ini tengah melakukan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Verifikasi ini penting sebagai salah satu syarat pemberian bantuan rehabilitasi terhadap RTLH yang ada di Bumi Sembada.

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, mengatakan TFL

juga akan mendampingi penerima bantuan selama merehabilitasi rumah. Dengan begitu, penggunaan dana dapat dilakukan optimal dan rehabilitasi sesuai spesifikasi.

“Sistem kontrak per orang. Untuk jumlahnya berkurang, karena tahun lalu ada 26 orang. Untuk seleksi sudah lama digelar. Kontraknya yang baru,” kata Suwarsono saat dihubungi, Minggu (9/3).

Sebelum mendapatkan bantuan, Suwarsono menyatakan para penerima

bantuan harus membuka rekening. Pemkab Sleman selanjutnya mentransfer dana bantuan langsung ke rekening penerima. Selanjutnya pemerintah kalurahan mendampingi selama rehabilitasi.

Mengenai alokasi APBD DIY untuk rehabilitasi RTLH di Sleman, dia mengaku belum mendapat informasi.

Sementara untuk jumlah RTLH di Sleman yang akan direhabilitasi, Suwarsono menyatakan ada 550 unit dengan anggaran dari APBD Sleman 2025

sebesar Rp8,3 miliar. Jumlah sasaran rehabilitasi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 778 unit. Pengurangan sasaran rehabilitasi terjadi akibat adanya kebijakan *refocusing* dari Pemerintah Pusat.

Pengurangan sasaran tersebut juga memengaruhi jumlah TFL yang dikontrak Pemkab. Semakin sedikit sasaran rehabilitasi, semakin sedikit juga TFL. Satu TFL dapat mendampingi lebih dari satu sasaran. Mengacu pada alokasi per unit pada tahun

lalu, rumah dengan kondisi rusak berat mendapat bantuan Rp20 juta, rusak sedang Rp15 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

Sementara, Data DPUPKP Sleman terbaru menyatakan ada 7.141 RTLH yang tersebar di seluruh kapanewon. Data ini tidak mencakup 4.278 RTLH yang telah direhabilitasi dalam empat tahun terakhir. RTLH menjadi salah satu indikator penentuan suatu wilayah masuk kategori miskin atau miskin ekstrem. (Andreas Yuda Pramono)